

# ABSTRAK

## ELYSE

Di abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan kan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan serta pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan penangkapan ikan yang dbenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik (*seine nets*), efektif apabila dilaksanakan karena Peraturan Menteri ini mengacu kepada Undang-Undang Perikanan. Pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa adanya surat ijin penangkapan ikan, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Pertimbangan hakim atas tndakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pid.Sus./2019 ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Nelayan, Ikan

## **ABSTRACT**

### **ELYSE**

In this modern era, fishing and management are equipped with quite modern equipment, no longer catching fish in the traditional way. However, the impact that is quite felt from these management activities is the effect on the marine ecosystem/environment, especially if the management is without regard to the mandatory provisions and requirements.

The problems in this study are the fishing rules that are justified in the applicable laws and regulations, criminal liability for fishermen who catch fish without a fishing permit and the judge's consideration of the actions of fishermen who catch fish in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1935 K/Pid. Sus./2019.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It is concluded that the fishing regulations that are justified in the applicable laws and regulations Based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning the prohibition of the use of trawling and seine nets, are effective if implemented because this Ministerial Regulation refers to the Fisheries Act. Criminal liability for fishermen who catch fish without a license to catch fish, the criminal justice system is essentially a process of enforcing criminal law. Therefore, it is very closely related to the criminal legislation itself, both substantive law and criminal procedural law, because criminal legislation is basically an enforcement of criminal law "in abstracto" which will be realized in law enforcement "in concreto". The judge's consideration of the actions of fishermen who catch fish in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1935 K/Pid.Sus./2019 turns out that the *judex facti* decision in this case is not contrary to law and/or statutes, therefore the cassation request from Petitioner Cassation II / The Public Prosecutor was rejected

Keywords: Criminal Liability, Fishermen, Fish